

Bara #2019GantiPresiden Jokowi, Neno Warisman dan HTI

Suriyanto, CNN Indonesia | Selasa, 28/08/2018 09:52 WIB



Presiden Jokowi harus menunjukkan sikapnya sebagai negarawan dalam kasus larangan aksi #2019GantiPresiden, dan bukan sebagai peserta Pilpres 2019. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pilpres belum lagi mulai, tapi acara layaknya kampanye sudah menjamur. Ada yang mendeklarasikan pembentukan relawan, ada yang deklarasi dukungan pada salah satu pasangan calon, ada pula yang sejak awal menggaungkan #2019GantiPresiden.

Tak cuma di dunia nyata, di dunia maya mereka bergerilya. #2019GantiPresiden terus disuarakan. Sempat jadi tren di Twitter, tagar ini dilawan dengan #2019TetapJokowi.

Kegiatan ini dibantah sebagai curi *start* kampanye dengan dalih tak menyampaikan visi misi, atau jualan program jagoan masing-masing di Pilpres.

Lihat juga: [Gerindra: Pemerintah Tak Demokratis Larang #2019GantiPresiden](#)

Namun apa lacur, kegiatan-kegiatan semacam ini ternyata malah jadi arena adu *ngotot-ngototan* dua kelompok yang beda kepentingan dan beda dukungan.

Aksi #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah bahkan ditolak massa yang anti. Para pegiatnya seperti mantan penyanyi Neno Warisman dan musisi Ahmad Dhani ditolak. Di Surabaya, Dhani ditolak oleh massa. Di kota kelahirannya itu bahkan sempat terjadi kericuhan.

Sempat terdengar sebutan bernada tak sopan di video yang diunggah Dhani di akun Instagramnya yang menyingung Barisan Serba Guna (Banser), sayap organisasi Gerakan Pemuda Anshor, Nahdlatul Ulama.

NU meski tak mendukung secara resmi salah satu pasangan calon, pimpinan tertinggi mereka, Ma'ruf Amin jadi calon wakil presiden untuk Jokowi. Ditambah lagi Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas adalah calon legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres.

Sementara Neno Warisman ditolak di Pekanbaru, Riau setelah sebelumnya ditolak juga di Batam, Kepulauan Riau.



Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Polisi juga ikut-ikutan. Dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi melarang atau bahasa halusnya, tak memberikan izin kegiatan #2019GantiPresiden digelar.

Sementara kecaman terhadap aksi #2019GantiPresiden datang dari partai politik koalisi pendukung pemerintah. Mereka menuding aksi tersebut menyebar kebencian.

Mereka meminta jika aksi tersebut aksi politik, maka dilakukan saat kampanye dimulai dan jelas mencantumkan nama Prabowo Subianto sebagai kandidat capres, sebagai sosok yang didukung mengganti Jokowi.

Respons Jokowi Ditunggu

Istana belum bersuara soal ini, Jokowi juga belum angkat suara.

Namun menurut hemat saya, sebagai kepala negara yang bertanggung jawab terhadap keutuhan pelbagai elemen, Jokowi baiknya harus segera bersikap. Sikap seorang negarawan sebagai Presiden, bukan seorang politikus peserta Pilpres tahun depan.

Jokowi harus berada di tengah-tengah. Inilah saatnya ia menunjukkan bahwa ia yang selama dituding negatif oleh lawan politiknya, terutama pendukung #2019GantiPresiden,

dapat membuktikan diri.

Jokowi sudah semestinya memberikan ruang kepada mereka yang ingin menyuarakan pendapat mereka selama berada di jalur konstitusi dan tidak mengganggu keamanan. Jika ada yang mengkritik kinerjanya, wajar saja karena memang hasil kerja tidak bisa memuaskan semua pihak.

Saya kira, Jokowi mampu memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bisa mengawal dan mengamankan semua kegiatan masyarakat selama tidak melanggar hukum.

Lihat juga: [Ngabalin: Ahmad Dhani Diusir dari Surabaya itu Alhamdulillah](#)

Namun tindakan tegas tak pandang bulu harus dilakukan jika ada pelanggaran hukum seperti mengganggu keamanan masyarakat: tangkap mereka yang berbuat onar atau ada indikasi penggulingan kekuasaan secara ilegal alias makar.

Kepada para pendukung, sukarelawan, simpatisan, atau apapun istilahnya, Jokowi harus bisa mengimbau untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Toh dalam aksi #2019GantiPresiden, tak ada nama disebut, dilecehkan atau dihina yang macam-macam.

Yang ada cuma suara-suara tidak puas dengan kerja pemerintah saat ini. Tapi wajar kan kalau ada pihak yang tidak puas dan mengkritik selama caranya tidak melanggar hukum?

Jokowi patut melakukan itu semua karena saya yakin gerakan semacam ini tak terlalu berpengaruh pada perolehan suaranya kelak, apalagi menggembosinya.



Presiden Jokowi.

(Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Lihat juga: [Setara Institute Sebut Larangan #2019GantiPresiden Tabrak UUD](#)

Sampai saat ini, hasil survei sejumlah lembaga menempatkan mantan Wali Kota Solo itu

masih jauh di atas Prabowo Subianto.

Founder Alvara Research Center menyebut tak butuh analisis rumit untuk Pilpres. Menurutnya hasil Pilpres 2019 hanya akan mengulang Pilpres 2014.

Pasalnya baik Jokowi dan Prabowo punya pendukung fanatik sehingga peta politik relatif tak akan berubah tahun depan.

Hampir semua lembaga survei menempatkan Jokowi masih unggul di atas Prabowo. Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin diperkirakan punya elektabilitas di atas 50 persen. Sementara Prabowo dan Sandiaga di atas 30 persen. Untuk responden yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihannya berjumlah belasan persen.

Dengan kondisi seperti ini, tak ada kekhawatiran bagi Jokowi suaranya bisa tergerus dengan aksi-aksi seperti #2019GantiPresiden.

Simpaty Masyarakat

Bahkan dengan bersikap negarawan dengan membiarkan sebuah kelompok menyuarakan pendapatnya, Jokowi bisa meraih simpaty masyarakat dan bukan tidak mungkin menguatkan dukungan untuknya di Pilpres mendatang.

Terlepas dari apapun sikap Jokowi nanti, saya berharap bisa membawa kedamaian dan mendinginkan suhu politik. Bayangkan kalau tensi ini tidak segera diturunkan dan polemik tidak segera diredam.

Lihat juga: [Anies Baswedan: Tidak Cukup Hanya Kerja, Kerja, Kerja](#)

Pilpres belum lagi mulai, tapi saling sikut sudah terjadi.

Meminjam pernyataan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak: "Mengapa kita bergembira saja ketimbang menebar horor-horor demokrasi? Toh masing-masing pasangan calon tujuannya sama, mensejahterakan Indonesia."

Keutuhan bangsa ini terlalu mahal jika harus dipertaruhkan dengan sikut-sikutan politik sesaat. (asa)

HTI Respons soal Panji Khilafah

dalam Aksi #2019GantiPresiden

Ihsan Dalimunthe, CNN Indonesia | Selasa, 28/08/2018 09:03 WIB



Jubir HTI Ismail Yusanto menduga ada peran kontra intelijen yang berusaha menggiring opini bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukan murni aspirasi rakyat. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara [Hizbut Tahrir Indonesia](#) (HTI) Ismail Yusanto menepis tuduhan yang dilontarkan kubu pendukung pemerintah [Joko Widodo](#) dan Gerakan Pemuda Anshor soal aksi 2019 ganti presiden ditanggung kelompoknya.

"Itu tuduhan yang ngawur dan salah besar," tegas Ismail kepada *CNNIndonesia.com*, Selasa (28/8).

Tuduhan tersebut kata Ismail telah melecehkan masyarakat dan pelopor gerakan [#2019GantiPresiden](#). Kubu pro pemerintah diyakini Ismail sedang menggiring opini sesat seolah-olah gerakan 2019 ganti presiden tidak punya aspirasi sendiri dan mudah diperintah oleh kelompok tertentu.

Lihat juga: [Kubu Jokowi Tudung HTI Tanggung #2019GantiPresiden](#)

Ismail meyakini keberadaan spanduk ataupun bendera HTI di tengah-tengah deklarasi ganti presiden di setiap daerah adalah ulah intelijen. Dia menjamin tidak ada instruksi ataupun keinginan anggota HTI untuk memasang spanduk ataupun membawa bendera saat aksi.

"Jadi itu kontra intelijen. Ada yang sengaja memasang untuk mengecilkan peran gerakan 2019 ganti presiden. Kami tidak pernah bawa bendera HTI atau pasang spanduk khilafah atau negara Islam Indonesia. Itu kerjaan orang tidak bertanggung jawab," ungkap Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menekankan anggota HTI masih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan dan harapan di pemilu presiden (pilpres) 2019

mendatang.

Lihat juga: [Kontra Intelijen Dituding Kaitkan HTI dan #2019GantiPresiden](#)

Sebagai bagian dari umat yang memiliki aspirasi yang sama, kata Ismail, anggota HTI juga ingin menjalankan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan pemimpin yang ingkar janji tidak layak memimpin republik ini.

Tak hanya itu, Ismail juga mengungkapkan anggota HTI ikut mendukung gerakan #2019GantiPresiden karena menurut mereka rezim saat ini sudah berbuat zalim terhadap gerakan dakwah dan ormas umat Islam.

Pihaknya kemudian mengkritisi sikap Presiden Jokowi sampai hari ini tidak mau berkomentar soal banyaknya persekusi terhadap warganya terkait aksi 2019 ganti presiden.

"Rakyatnya dipersekusi tapi presiden diam saja. Itu artinya dia setuju rakyatnya berkonflik," pungkas Ismail.



Ilustrasi. HTI membantah pasang bendera dan spanduk pro khilafah di aksi 2019 ganti presiden.

(CNN Indonesia/Tiara Sutari)

Logo PKS dan HTI memang terpampang pada sejumlah spanduk deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat dan juga di Surabaya Jawa Timur.

Selain memuat slogan #2019GantiPresiden serta foto Mardani dan Neno Warisman, dalam spanduk itu juga memuat tulisan 'saatnya khilafah ditegakkan'.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan ada aktivitas kontra intelijen di balik pemasangan spanduk #2019GantiPresiden berlogo HTI dan PKS

di sejumlah lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat.

Menurutnya, pemasangan spanduk itu ditujukan untuk mendiskreditkan kampanye #2019GantiPresiden.

"Saya melihat ini kontra intelijen. Ada yang melakukan untuk mendiskreditkan," ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/8).



[2:16 PM - Aug 27, 2018](#)



@ulinyusron

IG: ulinyusron

Mereka mau ganti sistem negara. Kalau ini salah coba tes beranikah Prabowo-Sandi menyatakan Bubarkan HTI? Pasti gak berani, karena dendam HTI pada Jokowi secara sadar dikapitalisasi untuk dukung Prabowo. Massa HTI jg secara sadar rela diperalat Prabowo. Kongsi sama2 sadar!

[2:16 PM - Aug 27, 2018](#)